

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang mencerminkan aspek yang berubah-ubah dari waktu ke waktu mengenai suatu perekonomian yang menggambarkan bagaimana suatu perekonomian dalam suatu daerah berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan. Dimana para ekonomi mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses pertumbuhan.²³

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, yang pertama adalah faktor produksi, faktor produksi dianggap sebagai kekuatan utama yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan, naik turunnya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat berupa faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala

²³ Hewi Susanti dkk, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Aceh Setelah Tsunami", *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol, 4 Nomor 1, 2017, hlm 2

produksi.²⁴ Sedangkan faktor non ekonomi yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya faktor sosial, faktor kualitas sumber daya manusia, faktor politik dan administratif.²⁵

Arah dan tujuan dalam pembangunan ekonomi adalah terciptanya kemakmuran rakyat. Pencapaian dalam kemakmuran rakyat secara kuantitatif dapat diukur dari ketercapaian dalam pendapatan nasional dan secara ekonomi makro dapat diukur dari besarnya PDB suatu negara. Untuk dapat mencapai perolehan PDB yang semakin besar dibutuhkan beberapa hal sebagai berikut ini:²⁶

- a. Faktor produk yang berkualitas
- b. Pengelolaan sumber daya yang efisien
- c. Penguasaan teknologi
- d. Penguatan peran modal sosial
- e. Partisipasi masyarakat
- f. Kebijakan pembangunan ekonomi yang konstruktif
- g. Daya saing komoditi
- h. Penyebaran pelaku ekonomi
- i. Akumulasi modal (baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri)

Dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi tersebut dapat melibatkan berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Berbagai pihak

²⁴ *Ibid*, hlm. 3

²⁵ *Ibid*, hlm. 4

²⁶ Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, (Yogyakarta: Penerbit Depublish, 2018), hlm. 21

tersebut memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan terhadap kepemilikan dan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi yang ada.²⁷

1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal.²⁸

Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan

²⁷ *Ibid*, hlm. 21

²⁸ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 234

produksi marginal. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.²⁹

b. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

1. Perkonomian bersifat tertutup.
2. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas

²⁹ *Ibid*, hlm. 235

penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut: $g = K = n$

Dimana :

g = Growth (tingkat pertumbuhan output)

K = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.³⁰

c. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow dan T.W. Swan. Model Solow-Swan

³⁰ *Ibid*, hlm 346

menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi.

Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan perlunya penyebaran informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik.³¹

d. **Teori Schumpeter**

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan

³¹ *Ibid*, hlm 350

mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah.

Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.³²

e. **Teori Rostow**

Teori ini dimunculkan oleh Prof. W.W. Rostow dalam bukunya *The Stages of Economic Growth* yang memberikan lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi.

Adapun kelima tahapan tersebut adalah:

1) Tahap Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Rostow mengartikan bahwa masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat yang:

- a) Cara-cara memproduksi yang relatif primitive
- b) Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas per pekerja masih sangat terbatas.

³² *Ibid*, hlm. 151

c) Kegiatan politik dan pemerintahan terdapat di daerah-daerah dipegang oleh tuan-tuan tanah yang berkuasa, dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan tuan-tuan tanah di berbagai daerah tersebut.

2) Tahap Prasyarat Lepas Landas

Tahap ini adalah tahap sebagai suatu masa transisi pada saat masyarakat mempersiapkan dirinya ataupun dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustain growth*).

3) Tahap Lepas Landas (*Take Off*)

Pada tahap ini tahap masyarakat tradisional dan tahap prasyarat untuk lepas landas telah dilewati. Pada periode ini, beberapa penghalang pertumbuhan dihilangkan dan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi diperluas dan dikembangkan, serta mendominasi masyarakat sehingga menyebabkan efektivitas investasi dan meningkatnya tabungan masyarakat.

4) Tahap Gerakan ke Arah Kedewasaan (*The Drive of Maturity*)

Gerakan ke arah kedewasaan diartikan sebagai suatu periode ketika masyarakat secara efektif menerapkan

teknologi modern dalam mengolah sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya.

Ciri-ciri gerakan ke arah kedewasaan adalah:

- a) Kematangan teknologi.
 - b) Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan.
 - c) Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi, karena berlakunya hukum kegunaan batas semakin berkurang.
- 5) Tahap Masa Konsumsi Tinggi.

Pada masa ini perhatian masyarakat mengarah kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi kepada masalah produksi.³³

2. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.³⁴ Selain itu yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

³³ Fadilah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Ekonomi Jawa timur Tahun 2010-2015* (Jakarta: Repository uinjkt, 2017) Hlm. 42

³⁴ Badan Pusat Statistik, pada <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 25 Februari 2020 pukul 23.39

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu yang dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya proses kelahiran, kematian, dan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain.³⁵

Pada pembangunan di suatu negara, penduduk mempunyai kedudukan yang amat berarti, dimana dalam asumsi klasik dapat diketahui bahwa banyaknya penduduk bisa berdampak pada suatu pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang tinggi, bisa diartikan sebagai cerminan dari tersedianya atau kesempatan yang besar serta jaminan adanya pemasukan dari faktor produksi. Sehingga apabila suatu peningkatan jumlah penduduk yang tinggi, akan memiliki pengaruh yang banyak terhadap kegiatan pembangunan, hal tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk yang tinggi akan tetapi dengan kualitas yang buruk, sehingga hal tersebut berdampak buruk kepada pembangunan.³⁶

Sehingga penduduk dalam suatu negara dapat dijadikan sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat terhadap pembangunan suatu negara tersebut. Penduduk bisa menjadi faktor pendukung pembangunan jika jumlah penduduk yang tinggi bisa menyediakan tenaga kerja yang luas, sehingga akan berfungsi sebagai produsen serta menjadi konsumen utama dari produksi barang dan jasa

³⁵ Safudirar, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1 No 1 2017, hlm. 95

³⁶ Ida Ayu Paramitha Astutibdan Ida Bagus Putra Astika, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17. 2016. Hlm, 2419

yang dihasilkan serta hal tersebut dapat berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun disini penduduk bisa menjadi faktor penghambat jika tingginya jumlah penduduk namun dengan kualitas rendah. Sehingga hal tersebut bisa menjadi tanggungan pemerintah selama pembangunan suatu negara.³⁷

Tingkat pertumbuhan penduduk adalah sebuah indikator yang sangat penting yang digunakan oleh berbagai negara didunia untuk melihat keberhasilan masing-masing Negara dalam berbagai bidang pembangunan. Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan resultante atau hasil dari perubahan 3 komponen demografi utama, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi (perpindahan penduduk).³⁸

a. Kelahiran atau Fertilitas

Fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Konsep ini memberikan makna fertilitas menyangkut jumlah kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita atau sekelompok wanita. Suatu kelahiran disebut sebagai lahir hidup apabila pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan seperti berteriak, bernafas, jantung berdenyut. Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda seperti itu, maka disebut sebagai lahir mati yang didalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. Dengan demikian fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup.

³⁷ *Ibid*, hlm, 2420

³⁸ A A I N Marhaeni, *Buku Pegangan Pengantar Kependudukan Jilid 1*, (CV. Sastra Utama :Denpasar, 2018) hlm.38

Ada 2 macam pengukuran fertilitas yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas tahunan adalah mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Pengukuran fertilitas kumulatif adalah mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga mencapai umur tertentu (usia subur), hingga mengakhiri masa reproduksinya.³⁹

Tinggi rendahnya kelahiran dalam suatu penduduk erat hubungannya dan tergantung pada struktur umur, banyaknya perkawinan, umur pada waktu perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, pengguguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita serta pembangunan ekonomi.⁴⁰

b. Kematian atau Mortalitas

Mortalitas atau kematian penduduk adalah salah satu dari variabel demografi yang penting. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi jumlah penduduk, tetapi juga mencerminkan kualitas SDM yang ada ditempat tersebut, yang sekaligus juga mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Definisi mati adalah peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 67

⁴⁰ Kartomo Wirosuharjo, *Buku Pegangan Kependudukan*, (Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1980), hlm. 22

dapat terjadi setiap saat setelah terjadi kelahiran hidup. Jadi mati hanya dapat terjadi setelah terjadi kelahiran hidup.⁴¹

c. Migrasi atau Perpindahan Penduduk

Migrasi adalah perpindahan penduduk yang didorong faktor permasalahan kependudukan terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan di suatu wilayah tertentu. Tujuan dari migrasi ini adalah untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik sebelumnya. Secara umum, migrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis antara lain sebagai berikut;⁴²

1). Migrasi Nasional

Merupakan perpindahan penduduk di dalam satu wilayah negara dengan dorongan tidak adanya keterpaksaan, serta bertujuan untuk mendapatkan taraf penghidupan yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan.

2). Migrasi Internasional

Migrasi internasional adalah jenis perpindahan penduduk yang dilakukan oleh masyarakat dari penduduk negara ke suatu negara lainya atau dengan kata yang lain migrasi lintas negara dalam lingkup internasional. Migrasi ini bertujuan mencapai kehidupan yang lebih baik

⁴¹ A A I N Marhaeni, *Buku Pegangan Pengantar Kependudukan Jilid 1*, (CV. Sastra Utama :Denpasar, 2018) hlm. 74

⁴² *Ibid*, hlm. 75

Tingkat kelahiran atau fertilitas juga hasil dari berbagai kondisi di masyarakat yang akhirnya menentukan tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah. Tingkat pertumbuhan penduduk di satu saat tertentu sudah merupakan hasil akhir dari penambahan karena peristiwa fertilitas, pengurangan jumlah penduduk karena mortalitas, dan pengurangan atau penambahan jumlah penduduk akibat migrasi neto yang negatif atau positif.⁴³

2.1 Teori Jumlah Penduduk

a. Teori Malthus

Dalam teori Malthus dikemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat disebabkan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan menyebabkan kehamilan serta kelahiran tidak bisa dihentikan. Sementara di saat bersamaan, jumlah penduduk yang meningkat juga memerlukan pasokan pangan yang cukup. Malthus mengatakan bahwa jika tidak ada faktor penghambat, maka penduduk akan tumbuh menurut deret ukur sedangkan sumber-sumber pangan akan tumbuh seperti deret hitung. Dia juga mengatakan bahwa faktor yang menghambat perkembangan penduduk adalah *preventive checks* yaitu *moral restraint* dan *vice* serta *positive check* yaitu *vice* dan *misery*. Dalam *preventive checks* pengurangan penduduk dilakukan dengan

⁴³ *Ibid*, hlm. 76

menurunkan kelahiran melalui upaya-upaya untuk mengekang nafsu seksual (*moral restraint*) dan pengurangan kelahiran melalui aborsi, *homoseksualitas*, *promiscuity* dan *adultery* (*vice*). Sedangkan *positive checks* merupakan pengurangan penduduk melalui kematian yang meliputi kejahatan kriminalitas, dan pembunuhan (*vice*) serta melalui berbagai penyebab kematian seperti epidemik, bencana alam, kelaparan dan peperangan (*misery*).⁴⁴

Tabel 2.1

Pembatasan Penduduk Menurut Malthus

Preventive Checks		Positive Checks	
<i>Moral restraint</i> (pengekangan diri)	<i>Vice</i> (usaha pengangguran kelahiran)	<i>Vice</i> (segala jenis pengurangan penduduk melalui pembunuhan)	<i>Misery</i> (keadaan yang menyebabkan kematian)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua usaha yang mengekang hawa nafsu seksual ▪ Kesepakatan perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aborsi ▪ Homoseksual ▪ Promiscuity ▪ Adultery ▪ Penggunaan kontrasepsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembunuhan anak-anak ▪ Pembunuhan orang-orang cacat ▪ Pembunuhan orang-orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Epidemik penyakit ▪ Bencana alam ▪ Kelaparan ▪ Peperangan ▪ Kekurangan pangan

⁴⁴ Sonny Harry B. Harmadi, Modul 1 Pengantar Demografi, pada www.pustaka.ut.ac.id, hlm. 6

Pada abad ke-19, kelompok anti Malthus menyampaikan kritik terhadap teori Malthus dengan argument bahwa:⁴⁵

1. Malthus tidak memperhitungkan kemajuan transportasi yang menghubungkan daerah satu dengan yang lain, sehingga pengiriman bahan makanan ke daerah yang kekurangan pangan mudah untuk dilaksanakan.
2. Malthus tidak memperhitungkan kemajuan pesat dalam bidang teknologi terutama dalam bidang pertanian, karena pertanian dapat ditingkatkan dengan cepat dengan menggunakan teknologi baru.
3. Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah, artinya pengontrolan kelahiran yang diutarakan oleh Malthus dianggap tidak bermoral.
4. Fertilitas akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk meningkat.

b. Teori Marxist

Aliran Marxist yang dicetuskan oleh Karl Mark dan Friedrich Engels, mengatakan terdapat 3 hal dalam kaitannya penduduk dan faktor yang mempengaruhi. Teori ini dulu banyak digunakan di

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 7

negara-negara yang menganut paham sosialis seperti Cina, Vietnam maupun Korea Utara. Dalam teorinya dikatakan bahwa:⁴⁶

1. Jumlah penduduk tidak memberikan tekanan berarti terhadap peningkatan kebutuhan pangan tetapi lebih besar dampaknya bagi kesempatan kerja.
2. Kemelaratan terjadi bukan karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian besar hak para buruh.
3. Semakin tinggi tingkat jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Hal ini terjadi jika teknologi tidak menggantikan tenaga kerja manusia. Sehingga manusia tidak perlu menekan jumlah kelahiran, dan ini berarti menolak teori Malthus tentang *moral restraint* untuk menekan angka kelahiran.⁴⁷

c. Teori Neo-Malthusian

Teori ini dikemukakan oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich, dalam teorinya di abad ke 20, Bumi yang pada jaman Malthus masih kosong mulai dipadati oleh manusia. Setiap minggu lebih dari 10 juta bayi diperkirakan lahir di dunia, sehingga semakin banyak manusia yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Sementara keadaan pangan terbatas dan kerusakan lingkungan semakin meingkat sebagai akibat peningkatan jumlah

⁴⁶*Ibid*, hlm 7

⁴⁷*Ibid*, hlm. 8-9

penduduk. Aliran ini dilengkapi oleh Meadow dalam bukunya yang berjudul *The Limit to Growth* yang memperlihatkan hubungan antara variabel lingkungan yaitu penduduk, produksi pertanian, industry dan sumber daya alam serta polusi. Pertumbuhan penduduk dapat dibatasi dengan melakukan pembatasan kelahiran.

2.2 Hubungan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk dan pembangunan merupakan dua kata yang mempunyai makna berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. penduduk mengacu pada manusia, individu, orang atau sekumpulan orang-orang dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan pembangunan mempunyai arti proses merubah sesuatu menjadi lebih baik atau membuat sesuatu menjadi lebih baik, untuk dinikmati dan di manfaatkan oleh penduduk.

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan penduduk baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pembangunan, penduduk menjadi subjek sekaligus objek. Penduduk menjadi subjek karena penduduk menjadi sasaran yang dibangun, yang meliputi peningkatan kemampuan (empowered) dan makin meluasnya berbagai kesempatan (opportunity) sehingga penduduk menikmati pembangunan yang telah dilakukan. Sebagai sasaran dan penikmat hasil pembangunan diperlakukan jumlah, struktur dan laju

pertumbuhan penduduk serta persebarannya untuk mencapai pemerataan dan keadilan.⁴⁸

Sementara di sisi yang lain penduduk juga menjadi penentu dan pelaku dalam kesuksesan pembangunan. Penduduk sebagai penentu dan pelaku utama dalam pembangunan, memerlukan kualitas dan produktivitas yang tinggi sehingga pembangunan yang dihasilkan juga akan tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan dapat berkelanjutan tidak dapat terjadi apabila tidak dibarengi dengan pembangunan manusia. Integrasi variabel kependudukan dengan pembangunan merupakan suatu upaya memberikan posisi penting pada perencanaan kependudukan. Terdapat hubungan yang timbal balik antara perubahan dalam variabel-variabel kependudukan dengan pemakaian sumber daya alam, lingkungan dan kualitas pembangunan sosial ekonomi.

3. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, dimana pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan suatu daerah tersebut. belanja daerah digunakan sebagai hak provinsi atau kabupaten/kota, dimana hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Belanja Daerah sendiri telah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah sehingga akan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 11

⁴⁹ Siska Angraini Putri dan Hendry Cahyono, Pengaruh Belanja Daerah Dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur, Vol 01 No 01, 2012, hlm. 2

memangkas jumlah dana. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dibagi menjadi dua yaitu:

1. Belanja Langsung.

Belanja Langsung merupakan pengeluaran yang telah dianggarkan secara langsung sesuai kegiatan serta program.

2. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung bisa diartikan sebagai pengeluaran yang dianggarkan namun tidak ada hubungan secara langsung untuk pelaksanaan program serta kegiatan.

Belanja daerah dapat dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah untuk keperluan suatu daerah tersebut. belanja daerah menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

⁵⁰ Siska Anggraini Putri dan Hendry Cahyono, Pengaruh Belanja Daerah Dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur, Vol 01 No 01, 2012, hlm. 2

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:⁵¹

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

- 1) Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
- 2) Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- 3) Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
- 4) Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

⁵¹ Ana Mei Refika, *Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia*, (Bandar Lampung: Repository Raden Intan , 2017), hlm. 8

b. Belanja Operasi

Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

- 1) Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
- 2) Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- 3) Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- 4) Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja

yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

- 1) Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
- 2) Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

- 1) Angsuran Pinjaman
- 2) Dana Bantuan
- 3) Dana Cadangan

e. Belanja Tak Tersangka

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

3.1 Teori Belanja Daerah

Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam teorinya pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Keadaan ini disebut sebagai hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Intinya, apabila kegiatan pemerintah meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Selain itu Wagner juga menyatakan bahwa ada beberapa penyebab naiknya pengeluaran, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban.
- b. Meningkatnya fungsi kesejahteraan.
- c. Meningkatnya fungsi perbankan.
- d. Meningkatnya fungsi pembangunan.

Berbagai alasan diatas bertujuan untuk mengatasi problematika yang dihadapi oleh pemerintah, seperti: masalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan lainnya.

3.2 Hubungan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian public. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana public melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan

⁵² Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Deepublish,2018), hlm. 35

semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, maka itu analisis terhadap belanja harusnya dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.⁵³

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya.⁵⁴

Kemiskinan juga menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan

⁵³ Deviani, Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan (Studi Empiris Kota Dan Kabupaten Di Sumatra Barat), *Pekbis Jurnal*, Vol.8, No.1, 2016. Hlm. 2

⁵⁴ Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 80

tersebut. Salah satunya definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak⁵⁵

Dari definisi diatas diperoleh pengertian bahwa kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal standar hidup yang layak.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas.
- b. Rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya piker dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif.
- c. Terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan.
- d. Kondisi terisolasi mengakibatkan pelayanan publik tidak dapat menjangkaunya.
- e. Ketidak stabilan politik berdampak pada ketidak berhasilan kebijakan pro-poor.

⁵⁵ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 9

⁵⁶ Ibid, hlm.11

4.1 Teori Kemiskinan

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan yaitu:⁵⁷

- a. Dari segi penawaran (*supply*): tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah diakibatkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi), yang kemudian akan menyebabkan kekurangan modal dan demikian tingkat produktifitasnya rendah.
- b. Dari segi permintaan (*demand*) di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat sangat rendah tersebut dikarenakan tingkat produktivitas yang rendah sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu, disebabkan kekurangan perangsang untuk menanam modal dan seterusnya.

4.2 Hubungan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Namun demikian pengaruh tersebut dapat saja berbeda antara wilayah yang satu dengan yang

⁵⁷ Rahmawati Faturrohmin, Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan (Jakarta;Repository UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 13-14

lainnya. Keadaan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, urbanisasi memiliki kaitan penting dalam menentukan pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah kemiskinan. Menurut Jonaidi terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵⁸

5. Angkatan Kerja

Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.⁵⁹ Selain itu angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.⁶⁰ Menurut Mulyadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa.⁶¹

⁵⁸ Denni Setiawan Jayadi dan Aloysius Gunadi Bata, *Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Kemiskinan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 2004-2012*, Modus, Vol. 28, hlm. 88

⁵⁹ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), hlm. 132

⁶⁰ Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta: UU STIM YKPM, 2014), hlm. 6

⁶¹ Mulyadi Sabri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, hlm. 72.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang bukan angkatan kerja yakni penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.⁶²

Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yakni:⁶³

a. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah.

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK.

b. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga.

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.

c. Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relative meningkat.

⁶² Badan Pusat Statistik, pada <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 14 Desember 2020 pukul 12.76

⁶³ Sonny Sumarsono. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu2009). Hlm, 76

d. Struktur Umur

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah. Oleh sebab itu TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.

e. Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, atau dengan kata lain semakin tinggi TPK.

f. Tingkat Pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula.

g. Kegiatan perekonomian.

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut

menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan perekonomian semakin besar TPAK.

5.1 Teori Angkatan Kerja

a. Teori Klasik Adam Smith

Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.⁶⁴

b. Teori Keynes

Keynes berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli

⁶⁴ Hadi Setiawan, Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tenaga Kerja, Dan Infrastruktur Terhadap penanaman Modal Asing Di Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 36

masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang.

Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga. Jika harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal labor (*marginal value of productivity of labor*) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi jika harga-harga turun drastis, ini menyebabkan kurva nilai produktivitas marjinal labor turun drastis pula dan jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas.

5.2 Hubungan Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah tingkat produksi. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Input tenaga kerja melalui keterampilan, pengetahuan dan disiplin merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara atau daerah, walaupun mampu membeli berbagai peralatan canggih, tetapi tidak bisa mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif.

Dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia, berarti dapat menambah jumlah tenaga kerja produktif melalui tenaga kerja yang terampil sehingga produksi akan meningkat, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB. Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi.

6. Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.⁶⁵ Dalam pengertiannya yang paling luas pengangguran berarti keadaan tidak memiliki pekerjaan. Namun, bagi para ekonom definisi tersebut tidaklah memadai. Sedangkan menurut BPS, pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, mencari pekerjaan tapi merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta diterima kerja tetapi belum mulai bekerja.⁶⁶

Ditinjau dari sudut pandang individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu ia dapat mengganggu taraf

⁶⁵ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.109

⁶⁶ Badan Pusat Statistik, pada <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 14 Desember 2020 pukul 14.76

kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologi yang buruk atas dari pengangguran dan keluarganya.

Berikut ini merupakan jenis-jenis pengangguran:

- a. Pengangguran berdasarkan sebab terjadinya.
 - 1) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh berubahnya struktur ekonomi, misalnya perubahan ekonomi dari agraris menjadi industri menyebabkan tenaga kerja belum siap melakukan olah teknologi.
 - 2) Pengangguran fraksional, yaitu pengangguran yang disebabkan karena kesulitan waktu untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja.
 - 3) Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh pergantian musim.
- b. Pengangguran Menurut Pendapat Edgar O Edwards
 - 1) Pengangguran terbuka (*Open Employment*), yaitu pengangguran yang tidak bekerja karena ada harapan yang lebih baik (sukarela) dan orang yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.
 - 2) Setengah pengangguran (*Under Employment*), yaitu bekerja berdasarkan lamanya waktu (jam, hari, minggu, musiman).
 - 3) Pengangguran tertutup, yaitu bekerja tidak penuh, diantaranya;

- a) pengangguran tidak kentara, contohnya petani yang bekerja diladang seharian penuh padahal pekerjaan tersebut sebenarnya tidak memerlukan sehari penuh.
- b) pengangguran tersembunyi (*Hidden Employment*), yaitu orang yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan pendidikan.
- c) pensiunan lebih awal (*Premature Retired Employment*).
- d) Tenaga kerja yang lemah (*Impired Labour*), yaitu orang yang bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena sakit.
- e) Tenaga kerja tidak produktif (*Unproductive Labour*), yaitu orang yang mampu memproduksi tetapi sumber daya pendukung tidak memadai sehingga tidak dapat memproduksi secara maksimal.⁶⁷

Perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut Tingkat Pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari presentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.⁶⁸

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

⁶⁷ Iskandar Putong, *Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Volume 1 Dari Ekonomi Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, -), hlm.398

⁶⁸ Riza Ronaldo, Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, No 2, 2019, hlm. 137-152

6.1 Teori Pengangguran

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga.

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.⁶⁹

6.2 Hubungan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan hukum okun (*okun's law*), diambil dari

⁶⁹Ibid, hlm.399

mana Arthur Okun, ekonom yang pertama kali mempelajarinya. Yang menyatakan adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan output dalam siklus bisnis. Hasil studi empirisnya menunjukkan bahwa penambahan 1 (satu) point pengangguran GDP (*Gross Domestic Product*) sebesar 2 persen. Ini berarti terdapat pengaruh yang negative antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dan juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Penurunan pengangguran memperlihatkan ketidaksamaan. Hal ini mengakibatkan konsekuensi distribusional.⁷⁰

Pengangguran berhubungan dengan ketersediaan lapangan kerja, kesediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak di konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional maka akan semakin bermasalah harapan untuk melakukan pembukaan kapasitas produksi baru yang tentunya akan menyerap tenaga kerja yang baru pula. Pendapatan nasional yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita. Sehingga semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka makin besar kesempatan untuk tidak menganggur,

⁷⁰ Riza Ronaldo, Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, No 2, 2019, hlm. 142

dan sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi turun apalagi sampai negatif maka makin besar pula tingkat pengangguran.⁷¹

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dapat dipahami dari sudut manusianya bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.⁷²

Pembangunan harus dilakukan secara seimbang. Seimbang antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Artinya bahwa pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan kemampuan manusia saja, misalnya kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, umur yang lebih panjang ataupun memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Namun juga harus memperhatikan bagaimana manusia memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang

⁷¹ Iskandar Putong, *Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Volume 1 Dari Ekonomi Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, -), hlm.428

⁷² Badan Pusat Statistik, pada <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 14 Desember 2020 pukul 15.00

dapat meningkatkan hidup ketingkat yang lebih baik, misalnya dengan memanfaatkan kemampuannya untuk bekerja.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.⁷³

Indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:⁷⁴

- a. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- b. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga)
- c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

⁷³ Irmayanti, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Polewali Mandar, (Makasar: Repository UIN Alaudin Makasar, 2017), hlm. 21

⁷⁴ Asnidar, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur, *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, VOL. 2, NO. 1, Tahun 2018, hlm.4

Ada beberapa alasan paradigma pembangunan manusia ini penting, yaitu:⁷⁵

- a. Pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia.
- b. Mengemban misi pemberantasan kemiskinan
- c. Mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa
- d. Memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem
- e. Memperkuat basis civil society dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi, dan
- f. Merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan.

Ada beberapa premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- b. Pembangunan dimaksudkan tersebut untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 4

- c. Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya⁷⁶

7.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal dan teknologi. Salah satu alat mengukur pembangunan kuantitas dan kualitas tenaga kerja adalah Indeks Pembangunan Manusia.⁷⁷

Namun disini Harrod Domard memiliki pendapat bahwa pertambahan produksi dan pendapatan masyarakat bukan ditentukan oleh kapasitas memproduksi tetapi disebabkan oleh

⁷⁶ Irmayanti, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Polewali Mandar, (Makasar: Repository UIN Alaudin Makasar, 2017), hlm. 19-20

⁷⁷ Todaro Michael, P. dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan. (Jakarta: Erlangga. 2013), hlm. 150.

kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian walaupun kapasitas dalam memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila pengeluaran masyarakat meningkat dibandingkan masa lalu. Berangkat dari hal itu bahwa analisis Harrod-Domar menunjukkan syarat yang diperlukan agar dalam jangka panjang kemampuan memproduksi bertambah dari masa ke masa yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya akan selalu sepenuhnya digunakan.⁷⁸

7.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah/*dual causation* (dimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pembangunan manusia namun disisi lain peningkatan pembangunan manusia memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan

⁷⁸ Yunita Mahrany, *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*. Jurnal, 2012, hlm. 30

ekonomi. Pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau dalam ilmu ekonomi lazim disebut mutu modal manusia

8. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantas kemiskinan.⁷⁹ Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur tingkat kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.⁸⁰

Perhitungan angka harapan hidup terdapat dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*) yaitu berdasarkan angka kematian berdasarkan umur (*Age Specific Death Rate*) yang diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun. Namun pencatatan kematian di Indonesia masih belum berjalan dengan baik sehingga BPS menghitung angka harapan hidup dengan metode tidak langsung yaitu

⁷⁹ Badan Pusat Statistik, pada <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 14 Desember 2020 pukul 15.00

⁸⁰ Rahmawati Faturrohmin, *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup, dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan*, (Jakarta: Repository UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm 31

dengan menggunakan bantuan computer *Mortpak Lite*.⁸¹ Metode tidak langsung ini menghitung angka harapan hidup berdasarkan rata-rata usia wanita melahirkan anak pertama (*mean age of childbearing*), rata-rata anak yang pernah dilahirkan (*children ever born*) dan rata-rata anak masih hidup (*children surviving*).

Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan investasi akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan.⁸²

8.1 Teori Angka Harapan Hidup (AHH)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal pembangunan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari indikator pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan modal manusia (*Human Capital*), yang mempunyai peran yang sangat

⁸¹ Badan Pusat Statistik, pada <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 14 Desember 2020 pukul 15.00

⁸² *Ibid*, hlm. 32

penting dalam pembangunan ekonomi. Maka dari itu untuk menambah produktifitas masyarakat sehingga menciptakan prooduk barang dan jasa hingga terus meningkat maka harus ditingkatkan juga indeks kesehatan dan indeks lama sekolah. Menurut Becker bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (capital) yang menghasilkan pengembalian (return) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi.⁸³

Menurut Jhingan salah satu pengembangan sumber daya manusia pengembangan sumber daya manusia yaitu fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat, rendahnya pelayanan kesehatan pada masyarakat akan berdampak pada masyarakat pekerja yang kurang produktif dengan tingkat mental terbelakang. Hal ini akan berdampak terhadap produktifitas yang kurang tinggi dan menghasilkan output yang rendah.⁸⁴

8.2 Hubungan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Pertumbuhan Ekonomi

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

⁸³ Novi Sri dkk, Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* ISSN: 2337-3067, tahun 2016, hlm. 3456

⁸⁴ Andi Lopa Ginting, Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan, *EcceS: Economics Sosial and Development Studies*, Vol 7, No 1, 2020

umumnya, dan meningkatkan derajat pada khususnya. Apabila kesejahteraan mengalami peningkatan, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Dan hal tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah.

B. Penelitian Terdahulu

Salah satu acuan yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian terdahulu. Dengan banyaknya teori yang didapat peneliti, hal tersebut bisa mempermudah peneliti dalam membahas penelitian ini. Jurnal dan skripsi berikut ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang dipakai penulis sebagai sumber inspirasi serta referensi dalam melaksanakan penelitian ini.

Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Belanja Daerah Dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur” yang diteliti oleh Siska Anggraini Putri dan Hendry Cahyono. Tujuan dari penelitian ini supaya bisa memahami tingkat pengaruh belanja daerah serta PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2014. Dari hasil analisis dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa variabel belanja daerah Jawa Timur, memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2001 hingga tahun 2014, dengan probabilitas sebesar 0.0253. Sedangkan variabel PMDN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2001 hingga tahun 2014, dengan probabilitas PMDN sebesar 0.4390 dengan taraf signifikansi sebesar 5%.⁸⁵

Jurnal dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara yang diteliti oleh Azwar Hamid. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Dan diperoleh hasil sebagai berikut, jumlah penduduk secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁸⁶

Jurnal dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali yang diteliti oleh Novi Sri Handayani, I.K.G Bendesa dan Ni Nyoman Yuliami. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel eksogen yaitu jumlah penduduk, angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah, satu variabel intervening PDRB Per kapita dan satu variabel endogen pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2004-2013. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur dengan program AMOS. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; jumlah penduduk dan angka harapan hidup tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Rata-rata lama

⁸⁵ Siska Anggraini Putri, *Pengaruh Belanja Daerah dan PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur*, - Vol 01 Nomor 01 tahun 2012, hlm. 1-7

⁸⁶ Anwar Hamid, Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol.6 No 1 p-ISSN-4628 e-ISSN: 2579-8650 tahun 2018, hlm. 15-28

sekolah berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seseorang dapat meningkatkan PDRB per kapita. Jumlah penduduk secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti penambahan jumlah penduduk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Angka harapan hidup tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Rata-rata lama sekolah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu individu dapat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini berarti semakin tinggi PDRB per kapita dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB per kapita. Angka harapan hidup tidak berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB per Kapita. Pengaruh tidak langsung rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB per kapita berpengaruh positif. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang akan dapat meningkatkan PDRB per kapita dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.⁸⁷

Jurnal dengan judul Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo yang di teliti oleh

⁸⁷ Novi Sri Handayani, I.K.G Bendesa dan Ni Nyoman Yuliami, Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* ISSN : 2337-3067, Tahun 2016, hlm. 3449-3471

Moh. Arif Novriansyah, analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian untuk variabel pengangguran dan kemiskinan masing-masing memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan secara simultan variabel pengangguran dan kemiskinan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.⁸⁸

Jurnal dengan judul Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia yang diteliti oleh Riza Ronaldo, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁸⁹

Jurnal yang berjudul Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat yang diteliti oleh Yulina Eliza. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Analisis statistik terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif di sini dibantu dengan menggunakan tabel dan grafik. Secara inferensial akan digunakan pendekatan hasil perhitungan model regresi linear berganda, termasuk uji statistik.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata secara parsial Investasi berpengaruh

⁸⁸ Moh. Arif Novriansyah, Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo, *Gorontalo Development Review*, Vol.1, No.1, 2018, hlm. 59-72

⁸⁹ Riza Ronaldo, Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, No 2, 2019, hlm. 137-152

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah (rutin dan pembangunan) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Begitu pula secara simultan (bersama-sama) Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.⁹⁰

Jurnal yang berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur, yang diteliti oleh Asnidar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Data yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2006-2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan variabel Inflasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Secara simultan Indeks Pembangunan Manusia

⁹⁰ Yulina Eliza, Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat, *Pekbis Jurnal*, Vol.7, No.3, November 2015, hlm. 200-210

dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur.⁹¹

Banyak penelitian yang sudah mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi setiap penelitian tentu memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing daerah mengenai masalah tersebut. Baik dari lokasi, kesiapan SDM, penyebab terjadinya, tahapan yang dilalui, siapa saja yang terlibat dan kendala serta solusi yang dihadapi. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan 8 (delapan) variabel dimana 7 (tujuh) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen sehingga masih belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, khususnya pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

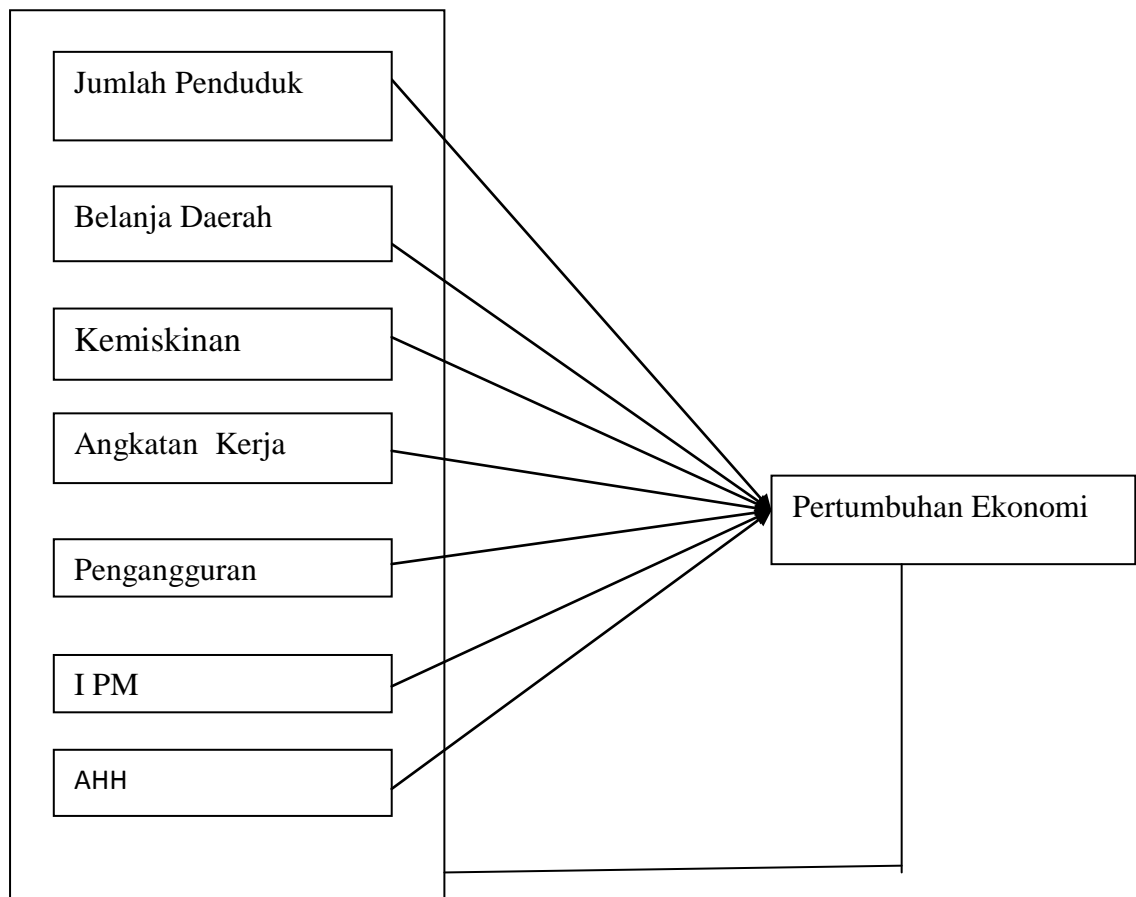
C. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual ialah struktur kerangka berpikir sehingga bisa dipakai rancangan untuk mengatasi masalah. Peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman untuk menyusun secara sistematis suatu penelitian. Sehingga seorang peneliti harus memahami maksud dari kerangka konseptual suatu penelitian, karena dengan adanya kerangka konseptual ini peneliti bisa mempermudah suatu penelitiannya. dalam penelitian, suatu kerangka konseptual berisi tentang hubungan variabel-variabel yang akan diteliti, kemudian variabel-variabel tersebut disajikan dalam bentuk diagram sehingga masalah dalam penelitian akan mudah dipahami.

⁹¹ Asnidar, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur, *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, VOL. 2, NO. 1, Tahun 2018, hlm.1-11

Berikut merupakan diagram kerangka konseptual dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, maka perlu digali hal-hal apa saja yang member dampak terhadap suatu pertumbuhan ekonomi. Di penelitian ini, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, belanja daerah, kemiskinan, angkatan kerja, pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka harapan hidup (AHH). Dengan memahami faktor yang

memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga di harapkan bisa membantu pemerintah Jawa Timur untuk menetapkan kebijakan supaya bisa mencapai tujuan yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai hasil penelitian sementara, sehingga hasil penelitian sementara ini masih perlu untuk diteliti kebenarannya. Dengan melihat kepada landasan pemikiran yang bersifat teoritis serta berdasarkan dari studi empiris yang sudah diteliti sesuai dengan penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2014-2018
2. Diduga belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2014-2018
3. Diduga kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2014-2018
4. Diduga angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018
5. Diduga pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018
6. Diduga indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018

7. Diduga Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018
8. Diduga jumlah penduduk, belanja daerah, kemiskinan, angkatan kerja, pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka harapan hidup (AHH) berpengaruh di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018.